Ricuh Taksi Dekat Rakernas Dewan

▶ Polisi Minta Jaga Batam Aman

BATAM, TRIBUN - Kericuhan antara pengemudi taksi pangkalan dengan taksi online seperti tak berujung. Meski perundingan terus dilakukan, namun kericuhan masih saja terjadi. Ironisnya kali ini terjadi di Jodoh, tak jauh dari pelaksanaan Rakernas III Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia di Swiss-Belhotel, Rabu (7/3).

Ketegangan dipicu lantaran order penumpang. Perdebatan antara kedua kelompok taksi berlangsung. "Ada yang kedapatan mengangkut , katanya driver cewek yang ketangkap, dan mengadu ke kawannya. Makanya jadi berdebat dan nyaris bentrok," ujar saksi mata.

Kericuhan antar kedua kelompok taksi bukan hanya sekali terjadi. Hingga sekarang belum ada yang mampu meredakan ketegangan antar kedua belah pihak.

"Selagi operasionalnya itu tidak memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana yang diatur pasti tetap akan terjadi bentrokan di lapangan. Seharusnya aplikator (seperti aplikasi Grab, Gojek, dan lainnya) harus bermitra dengan perusahaan yang sudah memiliki izin usaha angkutan," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Yusfa Hendri kepada Tribun, Rabu (7/3).

Pernyataan itu disambaikan menanggapi munculnya kericuhan antara taksi konvensional dengan taksi online di Jodoh, Rabu (7/3) siang. Dalam kejadian itu taksi-taksi pangkalan dan taksi online sempat terlibat ketegangan. Kejadian ini merupakan

● ke halaman 7

Tanggung Jawab Dishub

KISRUH antara para sopir taksi online dan taksi konvensional di kota berulang lagi pada Rabu (7/3) siang. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, Surya Makmur Nasution menegaskan, permasalahan ini harus ditangani oleh semua pihak.

"Kita harus membedakan antara tindakan pidana dan permasalahan administrasi. Kalau tindakan pidana harus ditangani oleh pihak kepolisian. Kalau masalah administrasi harus diselesaikan oleh instansi-instansi terkait," kata Surya kepada Tribun, Rabu (7/3).

Surya menegaskan, permasalahan seputar moda transportasi di Batam tetap menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kepri. Oleh karena itu, Dishub Kepri harus mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Dishub Kepri harus berko-

● ke halaman 7

> **Ketika Permenhub itu ditunda, saya hanya bisa berdoa supaya tidak ada konflik di Batam. Tetapi sekarang konflik terjadi lagi. Kita hanya bisa menonton**
>
> **JAMHUR ISMAIL**
> Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri

Kita Hanya Bisa Nonton Saja

KEPALA Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri Jamhur Ismail tidak bisa berkata apa-apa lagi terhadap kisruh antarsopir taksi online dan konvensional di kota Batam.

Ketika mendengar ada kisruh di Jodoh, Jamhur tidak langsung berkomentar. Dia meminta waktu untuk mengecek informasi mengenai kekisruhan tersebut.

Setelah beberapa jam berselang, Jamhur kemudian memberikan pernyataan yang bernada pasrah. "Kita hanya bisa menonton saja," kata Jamhur kepada Tribun, Rabu (7/3).

Jamhur sendiri awalnya begitu optimis akan pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang alat angkutan sewa khusus. Namun, dia justru sebaliknya pesimis ketika direktur jenderal hubungan darat mengeluarkan surat edara tentang penundaan

● ke halaman 7

Sambungan Hal.1

Ricuh Taksi

yang kesekian kalinya terjadi di Batam.

Yusfa mengakui kenyataan yang ada aplikator dalam fungsinya bukan sebagai penyelenggara badan usaha angkutan. Melainkan ia hanya sebagai penyedia aplikasi. Sementara penyedia angkutan itu kan badan usaha yang memiliki usaha angkutan. Itulah yang sekarang mengajukan izin ke Dishub Provinsi.

"Permen 108 itu kan mengatur tentang angkutan berbasis online. Izinnya kan diterbitkan oleh gubernur, nah, sebelum menerbitkan itu harus melakukan kajian tentang kebutuhan taksi di suatu daerah. Kalau di Batam berarti harus dikaji soal daerah Batam. Kajian ini dilakukan melalui konsultan." paparnya.

Ia melanjutkan kegiatannya dilelang melalui provinsi, sementara pertemuan di Graha Kepri terakhir, Kepala Dinas Provinsi menyampaikan acuan sementara dari Dishub Provinsi Kepri memberikan alokasi sebanyak 300 unit di Kota Batam.

"Namun dibertkan kesempatan kepada perusahaan yang mengajukan izin angkutan sewa khusus (ASK) dipersilahkan untuk memasukkan permohonan dengan melengkapi persyaratan. Tapi sampai sejauh ini berdasarkan koordinasi kami dengan Dishub Provinsi Kepri belum ada satu pun yang dikeluarkan izinnya. Karena ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi." sesalnya.

Dalam rapat tersebut juga ada perdebatan antara taksi online dengan konvensional. Pihak online mengatakan kuota itu sedikit dan berharap pemerintah bisa menambahkan melihat jumlah organda di Kota Batam yang banyak. Kemudian di sisi lain taksi konvensional tidak menyetujui adanya tambahan kuota taksi itu. Jadi pertemuan yang kemarin tak ada mengambil keputusan.

"Himbauan kami berikutnya, pertama segera lengkapi perizinannya sebelum beroperasi. Kedua sebenarnya kalau sudah terlanjur seperti ini harus ada semacam kesepakan yang dibuat diantara pihak yang mendudukan supaya menghasilkan Batam tetap kondusif." kata Yusfa.

Ia menegaskan persoalan-persoalan pertikaian yang menimbulkan kriminal hanya akan merugikan dan memperkeruh suasana. Tidak menyelesaikan persoalan di Kota Batam.

Jaga keamanan

Wakasatlantas Polresta Barelang AKP Kartijo mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan penindakan penilangan jika menemukan driver taksi aplikasi yang masih beroperasi. "Sampai surat izin itu belum dikeluarkan, kedapatan oleh petugas kita di lapangan, akan dilakukan penilangan." ujarya.

Disampaikannya, sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum untuk senantiasa mematuhi segala aturan yang berlaku di negara Indonesia. "Silahkan penuhi terlebih dahulu persyaratan yang menjadi aturan untuk bisa beroperasi ini." sebutnya.

Dirinya juga menghimbau, untuk menjaga bersama keamanan Batam. "Jika terjadi keributan seperti ini dan beberapa kejadian yang lalu, semua akan dirugikan. Marilah kita bersama menjadikan kota Batam ini aman dan tentram. Jika adanya perselisihan jangan diselesaikan dengan amarah, dudukan dengan bicara kepala dingin," himbaunya.**(dra/rus)**

Sambungan Hal.1

Tanggung Jawab

ordinasi dengan Dishub Kota Batam untuk mengurus zonasi atau wilayah operasi taksi online," ungkap Surya.

Selain itu, Dishub Kepri juga mesti mengeluarkan kuota taksi yang beroperasi di kot Batam. Surya memastikan, selama ini Dishub Kepri sedang mengkaji jumlah kuota taksi online dan konvensional. "Itu harus segera dilakukan sehingga semua tahu berapa jumlah taksi online yang beroperasi di kota Batam," tegas kader Demokrat ini.

Surya berharap supaya selama proses ini berjalan, semua pihak harus bersabar sampai keputusan bersama bisa diambil. Dia mengakui, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 sebenarnya menjadi pedoman yang baik bagi semua pihak. Kalau Permenhub itu ditaati maka permasalahan moda transportasi di kota Batam akan mendapat jalan keluar terbaik.

"Pihak aplikator harus masuk ke badan usaha yang mengelola taksi online. Sebaliknya pengemudi taksi konvensional juga mesti perlahan-lahan bergabung dengan pihak aplikator," usul Surya.

Maraknya kericuhan taksi online dan konvensional tak bisa dibiarkan terjadi berlama-lama. Anggota Komisi I DPRD Batam, Mustofa menegaskan kepada Pemko Batam harus melalui Kepala Dinas Perhubungan harus segera menindaklanjuti hal ini.

"Segera cari solusinya. Kalau dibiarkan lama-lama ricuh terus bisa mengakibatkan wisatawan tak datang lagi berkunjung ke Batam," tegasnya.

Ia menambahkan, kota Batam menjadi tak kondusif lagi. Yang dirugikan dari sisi pemerintah adalah PAD jadi berurang. Dari sisi kemasyarakatan secara ekonomi akan mengurangi aktivitas perputaran ekonomi.

"Untuk solusinya kesadaran dari diri sendiri itu perlu. Taksi online harus segera melengkapi perizinannya bila ingin mencari rezeki dari sisi itu untuk sementara. Agar tidak ada kecemburuan di lapangan," tegasnya. **(tom/rus)**

Sambungan Hal.1

Kita Hanya

pemberlakuan Permenhub itu sampai batas waktu yang tidak menentu.

"Ketika Permenhub itu ditunda, saya hanya bisa berdoa supaya tidak ada konflik di Batam. Tetapi sekarang konflik terjadi lagi. Kita hanya bisa menonton," ungkap Jamhur.

Dalam surat edaran direktur jenderal hubungan darat ditegaskan bahwa tidak ada pihak manapun yang mengambil tindakan terhadap berupa sweeping atau razia terhadap taksi online. Namun, Jamhur berharap semoga aparat keamanan bisa mengambil sikap terhadap konflik yang terus-menerus terjadi di kota Batam ini.

Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Kepulauan Riau Sopandi berharap, Pemprov Kepri segera mengatur batasan antara taksi online dan taksi konvensional jelang berlakunya perizinan transportasi berbasis online di Kota Batam.

Dikatakan Sopandi, batasan dimaksud agar kedua belah pihak bisa mengehindari gesekan-gesekan yang lebih besar, seperti yang terjadi beberapa kali belakangan ini.

"Karena di sini kita samasama warga Batam yang sama-sama ingin mencari nafkah. Jadi kita berharap timbul kebijkan yang samasama bisa memberikan kenyaman, baik para driver taksi online maupun taksi konvensional," kata Sopandi, Rabu (7/3)

Sopandi menuturkan, ADO selalu memantau kondisi yang terjadi di lapangan, khususnya kepada para driver taksi online agar tidak terpancing jika berseteru dengan taksi konvensional.

"Kita ingin keadaan tetap aman, dingin, dan berjalan dengan semestinya. Kita dari ADO selalu memperingatkan teman-teman Online agar tidak mudah terpancing emosi," ujar Sopandi. **(tom/egw)**

Wacana Pembebasan UWT Bergulir di Pusat

▶ Lukita: Kami Pungut Sesuai Aturan

BATAM, TRIBUN - Wacana pembebasan Uang Wajib Tahunan (UWT) bergulir saat rapat koordinasi BP Kawasan Batam bersama kementerian terkait, Selasa (6/3) lalu di Jakarta. Lantas bagaimana tanggapan Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo? Ditemui di Gedung BP Batam, Rabu (7/3), Lukita mengatakan, penghapusan UWT bukan menjadi kewenangan BP Batam. Rencana itu akan dibicarakan lagi dengan Presiden. Presidenpun sudah mendengar soal usulan tersebut.

"Penghapusan UWT itu bukan di tangan kami. Apapun keputusannya, BP Batam tak punya kewenangan untuk menentukannya," kata Lukita.

Hanya saja ditekankan Mantan Sekretaris Menko Perekonomian ini, sesuai aturannya semua tanah di Batam merupakan tanah negara dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Tak ada masyarakat yang punya hak milik.

"Menurut Kepres Nomor 41 tahun 1973, semua lahan di Batam adalah lahan negara. Bahwa ada proses pembelian dan penggantian, itu terjadi di masa itu. Karena itu HPL-nya diserahkan kepada BP Batam sebagai pengelola," ujarnya.

Dalam ketentuan tersebut juga, lanjutnya diatur, BP Batam bisa

● ke halaman 19

Jaga Ketersediaan Suplai Lele di Batam

▶ Amsakar Resmikan Kantor Asosiasi Peternak Ikan

BATAM, TRIBUN - Pemerintah Kota Batam meresmikan kantor Asosiasi Pengusaha Peternak dan Peternak ikan air tawar di Ruko Golden Wealth Tiban, Rabu (7/3).

Kantor ini diresmikan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan juga Danlanal Batam Kolonel Laut Iwan-Setiawan.

Dalam sambutannya, Amsakar mengatakan, saat ia menjadi Kadisperindag beberapa tahun lalu, permasalahan yang paling diingatnya yakni masalah harga jual lele. Bahkan permasalahan lele ini sampai dibahas seca-

● ke halaman 19

TRIBUN/EKO

POTONG TUMPENG- Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad memotong tumpeng sebagai tanda peresmian kantor Asosiasi Pengusaha Peternak dan Peternak ikan air tawar di Ruko Golden Wealth Tiban, Rabu (7/3).

BPOM Fokus Pantau Gudang Besar

BATAM, TRIBUN - Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepulauan Riau bersama tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP pada (6/3) sore menggerebek

salah satu gudang di Batu Ampar. Mereka menyita sejumlah produk pangan tanpa izin edar.

Penggerebekan yang dilakukan di PT ATN yang merupakan distributor produk pangan ini berhasil menemukan sedikitnya 45 produk makanan, mulai dari susu, makanan ringan, makanan kaleng, hingga minuman kaleng, dan sejumlah makanan siap saji lainnya disita.

Kepala BPOM Kepri di Batam, Yosef Dwi Irwan, mengatakan, produk yang diamankan rata-rata produk makanan yang sama sekali tidak memiliki izin edar.

Dalam pengawasannya, Yosef menyebutkan, saat ini fokus pengawasan BPOM terhadap pergudangan yang disinyalir menyimpan berbagai macam produk pangan.

"Kita memfokuskan di pergudangan. Mengapa difokuskan pada gudang, karena jumlah yang banyak dan salah satu mencegah peredaran barang tersebut," katanya, Rabu (7/3).

● ke halaman 19

Nina Karlina

Begal Masih Mengancam

BEREDARNYA kabar tentang begal dan tindak kejahatan dimana-mana, membu Nina Karlina mulai merasa tidak suka d ngan kondisi Batam sekarang. Apalagi r lihat kondisi ekonomi Batam saat ini.

"Kondisi ekonominya masih kurang. Pengangguran di Batam semakin mer kat sehingga menyebabkan ting kejahatan," kata wanita ya akrab disapa Nina ini.

Wanita kelahiran 28 tober 1996 ini mengat kekurangan Batam sa ini adalah kondisi eko mi yang menurun. H dikatakan karena nyak perusaha yang tutup se membuat pe guran bertam

"Yang suda kerja saja ban yang pengangg Apalagi ini yang mat sekolah, ta liah. Tentu akan ri kerja juga, jadi menambah penga an," kata Nina ya punyai hobi nor me ini

● k

Wacana Pembebasan

Sambungan **Hal.13**

memberikan beban uang UWT kepada masyarakat. Pendapatan dari UWT itu digunakan untuk membangun infrastruktur yang ada di Batam. Termasuklah untuk melakukan pembersihan, pematangan, penyiapan infrastruktur dan sebagainya.

"Itulah mengapa BP Batam sebagai pengelola diberikan kewenangan memungut UWT. BP Batam hanya menjalankan tugas sesuai ketentuan yang ada. Kalau pemerintah memutuskan dihapuskan, itu akan ada di tangan pemerintah," kata Lukita memberi penjelasan.

Sementara itu, mengenai jalannya rapat Selasa lalu, Lukita mengatakan, pihaknya hanya menyampaikan fakta-fakta mengenai mengapa ada UWT di Batam dan soal tarif-tarif UWT.

"Acuannya kami melihat Perka BP Batam soal lahan. Untuk wilayah paling mahal di di Batam, seperti Nagoya, sewanya Rp 160.100 per meter persegi untuk 30 tahun," ujarnya.

Sementara jika dikalkulasi hitungan setahun, tarif sewanya hanya sekitar Rp 6 ribuan per meter persegi. Begitupun untuk daerah yang masuk kategori sedang, tarifnya bisa turun sekitar Rp 3 ribuan per meter persegi setahun.

"Dan untuk wilayah yang masuk kategori murah seperti Sekupang, itu bisa sampai Rp 2.200 meter persegi setiap tahun tarif sewanya," kata Lukita.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Wali Kota Batam, Rudi terus mendorong pemerintah pusat membebaskan UWT terhadap permukiman di Batam. Nurdin mengatakan, pembebasan UWT untuk kawasan permukiman ini bagian dari menjadikan Batam dan Kepri semakin menarik untuk investor.

"Bersama wali kota, saya terus mendorong adanya pembebasan UWT untuk kawasan permukiman," kata Nurdin, seusai menghadiri rapat koordinasi tentang BP Kawasan Batam. **(wie)**

Jaga Ketersediaan

Sambungan **Hal.13**

ra serius dengan diadakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD Batam.

"Permasalahanya yakni harga lele dari Malaysia lebih murah dibanding di Batam. Itu yang paling saya ingat. Mungkin beberapa peternak lele yang ada di sini juga pernah ikut RDP beberapa tahub lalu," sebut Amsakar.

Menurut Amsakar, dehgan diresmikanya Aperikat ini diharapkan kedepannya bisa menjaga ketersedian suplai lele di Kota Batam.

Bagaimana pengusaha dan peternak bisa bersatu dan menekan monopoli harga pasar demi menjamin ketersediaan kebutuhan di pasar.

Sementara itu, Danlantamal Batam Kolonel Laut Iwan Setiawan mengatakan, dengan diresmikan kantor ini bisa memberikan wadah bagi peternak ikan. "Setidaknya bisa memajukan peternak ikan air tawar di Kota Batam," tegasnya.

Menurut Iwan, ini merupakan perintah langsung dari Mabes TNI AL terkait ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia.

"Dan inilah bentuk nyatanya. Kita sebagai pembina akan melindungi mereka juga," tegasnya. **(koe)**

BPOM Fokus

Sambungan **Hal.13**

Dirinya mengatakan, dalam pengawasan tidak terlepas dari grosir-grosir serta supermarket yang menjual berbagai pangan.

"Memang fokusnya di pergudangan, tetapi juga di grosir-grosir. Kita melakukan pengawasan yang sifatnya rutin, baik supermarket dan toko-toko kecil atau minimarket,"sebutnya.

Untuk melakukan pengawasan kepada toko-toko, supermarket secara keseluruhan yang ada di wilayah Kepri. Keterbatasan SDM menjadi salah satu masalahnya.

"Kita juga tidak bisa menjangkau keselurahan, karena keterbatasan porsenel. Soalnya ada ribuan toko dan grosir di Kepri," sebutnya memberikan alasannya.

Untuk itu, disampaikannya peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam membantu mengawasi peredaran barang tanpa izin edar.

"Bagi masyarakat yang menemukan barang tanpa izin edar BPOM silahkan hubungi kami. BPOM dalam pengawasan tidak hanya bahan pangan saja, tetapi seperti obat-obatan juga menjadi pengawasan kami," ucapnya.

"Kami sistemnya keliling melakukan pengawasan keseluruhan kabupaten/kota. Karena di Kepri BPOM hanya berkantor di Kota Batam. Tidak ada kantor perwakilan atau petugas yang standby di setiap kabupaten kota," paparnya.

Yosef menyebut untuk mengarahkan pada setiap perwakilan yang akan ditempatkan untuk kabupaten kota itu sudah menjadi rencana ke depan.

"Masih rencana. Nantinya ada setiap kabupaten kota perwakilan kantor BPOM yang mempunyai tugas pengawasan di wilayahnya masing-masing," pungkasnya. **(dra)**

Begal Masih

Sambungan **Hal.13**

Tetapi, si penyuka warna hitam ini suka dengan keadaan alam Batam yang indah. Dimana baginya terdapat tempat wisata yang bagus untuk liburan.

"Itu saja sayangnya keadaan yang kurang aman. Kayak begal, jambret, jadi kalau di jalan suka waswas takut. Gak malam saja, siang juga suka terjadi," ujarnya.

Gadis penyuka ayam goreng ini mempunyai harapan agar kondisi ekonomi Batam segera membaik. Tindak kejahatan bisa berkurang, kalau bisa dihilangkan. **(ani)**